

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan pilar utama dalam pembangunan lokal sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mempertanggungjawabkan anggaran yang bersumber dari APBN melalui APBD kabupaten/kota. Dengan dukungan dana desa, pemerintah desa diharapkan mampu menanggulangi berbagai masalah mendesak, termasuk di antaranya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks kesehatan, satu isu yang menjadi perhatian nasional adalah stunting, yaitu kondisi gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (Begum:2011). Stunting tidak hanya memengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk program-program pencegahan stunting, antara lain melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil, serta kegiatan edukasi gizi yang dilaksanakan oleh kader posyandu (Supriyadi:2020).

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting, melalui mekanisme berkelanjutan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan alokasi dana yang cukup besar. Dana yang telah dialokasikan tersebut kemudian akan di kelola oleh desa sendiri sebagaimana yang telah diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang keuangan desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan Desa di turunkan dalam bentuk kebijakan dasar berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI) Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri, Nomor 20 Tahun 2018) dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar pengelolaan dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Pemerintah desa harus memprioritaskan pembangunan di desanya sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Pembangunan sektor kesehatan di tingkat desa menghadapi tantangan serius dengan adanya empat permasalahan mendasar yang tersebar di hampir seluruh wilayah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan penanganan stunting tetap menjadi agenda prioritas utama yang memerlukan perhatian khusus, mengingat dampaknya yang terus mengkhawatirkan terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa upaya komprehensif dalam

mengatasi permasalahan gizi dan kesehatan anak di desa masih membutuhkan komitmen dan strategi yang lebih intensif dari pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Bokang Wolomatang telah mengalokasikan Dana Desa untuk mengatasi permasalahan stunting yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan di wilayahnya, namun implementasi program masih menghadapi tantangan signifikan yang tercermin dari data fluktuatif jumlah balita stunting selama periode 2021-2024 yang berkisar antara 6-9 balita per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen pemerintah desa dalam penanganan stunting telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan didukung dengan pengelolaan dana yang mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, namun efektivitas program belum optimal karena masih terdapat empat permasalahan mendasar yang umum dihadapi desa-desa di Indonesia. Oleh karena itu, Desa Bokang Wolomatang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam strategi penanganan stunting yang tidak hanya fokus pada aspek pengelolaan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas intervensi gizi, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor untuk mencapai penurunan angka stunting yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan desa.

Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting bukan hanya terkait dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana program-program penanganan tersebut dirancang dan

dilaksanakan secara efektif di tingkat desa (Setiawan:2022).Efektivitas dalam penanganan stunting ini diukur dari kemampuan program yang dibiayai oleh Dana Desa untuk mencapai tujuannya, yakni menurunkan angka stunting di desa. Efektivitas dinilai dari Capaian Output seperti jumlah balita dan ibu hamil yang menerima PMT (Pemberian Makanan Tambahan), jumlah posyandu aktif, jumlah pelatihan gizi. Capaian Outcome Penurunan angka stunting dalam 1–3 tahun terakhir, Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat keterlibatan warga dalam kegiatan serta persepsi mereka terhadap hasil program. Keberlanjutan Program adakah tindak lanjut seperti pelatihan, pendampingan, dan kebijakan yang berkelanjutan(Lestari:2022).

Desa Bokang Wolomatang, yang berada di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, merupakan salah satu desa yang turut mengalokasikan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting. Sebagai bagian dari proses pembangunan desa, anggaran dan realisasi dana desa untuk kegiatan pencegahan stunting tercatat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan data alokasi anggaran dana desa untuk program penanganan stunting di Desa Bokang Wolomatang selama periode 2022 hingga 2024:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Dana Stunting untuk Pencegahan Stunting pada
Desa Bokang Wolomatang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2021-2024

Tahun	Anggaran Dana pencegahan Stunting (Dalam Rupiah)	Realisasi Dana Pencegahan Stunting (Dalam Rupiah)	% Efisiensi Dana Stunting
2021	3.600,000	3,600,000	100%
2022	3,600,000	3,600,000	100%
2023	13,500,00	13,500,00	100%
2024	11,000,000	11,000,000	100%

Sumber : Kantor Desa Bokang Wolomatang.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Bokang Wolomatang untuk program pencegahan stunting mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2023. Pada tahun 2021 dan 2022, dana yang disiapkan hanya sebesar Rp 3.600.000, lalu meningkat hampir empat kali lipat menjadi Rp 13.500.000 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan alokasi menjadi Rp 11.000.000, meskipun jumlah ini masih jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022. Perubahan alokasi ini merefleksikan dinamika perencanaan desa yang berupaya menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan tahunan dan hasil evaluasi program di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk lebih serius dalam menangani masalah stunting, mengingat pentingnya penanganan gizi pada balita dan ibu hamil. Meskipun demikian, penting untuk memahami apakah peningkatan anggaran ini sebanding dengan penurunan angka stunting yang diharapkan. Seiring dengan peningkatan anggaran, penting untuk melihat apakah hasil yang dicapai dalam penurunan angka stunting mencerminkan

efektifitas penggunaan dana tersebut. Berdasarkan observasi data ,diketahui bahwa peningkatan anggaran tidak diikuti oleh penurunan jumlah kasus stunting yang signifikan. Bahkan pada tahun 2023, jumlah balita stunting meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berikut adalah data jumlah balita yang mengalami stunting di Desa Bokang Wolomatang:

Tabel 1.2
Data Jumlah Stunting di Desa Bokang Wolomatang

Tahun	Jumlah stunting
2021	8 Balita
2022	7 Balita
2023	9 Balita
2024	9 Balita

Sumber: Kantor Desa Bokang Wolomatang

Tabel 1.2 menunjukkan data jumlah balita yang mengalami stunting di Desa Bokang Wolomatang selama periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka stunting tidak menunjukkan tren penurunan yang konsisten, melainkan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8 balita mengalami stunting, sedikit menurun menjadi 7 balita pada tahun 2022. Namun, angka ini justru meningkat menjadi 9 balita pada tahun 2023 dan stagnan di angka yang sama pada tahun 2024. Pola ini mencerminkan bahwa upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah desa belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Kenaikan angka stunting, meskipun anggaran dan realisasi dana pencegahan stunting telah meningkat dan terserap secara penuh setiap tahunnya, menandakan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program dan dampak nyata yang dihasilkan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya

ketepatan dalam penentuan sasaran penerima manfaat, lemahnya pengawasan terhadap implementasi program, rendahnya kualitas intervensi gizi, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik, partisipatif, dan berbasis data sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mampu menjawab permasalahan utama yang menyebabkan stunting di desa tersebut. Pemerintah desa perlu mengevaluasi kembali strategi yang digunakan, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mendorong keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Peningkatan anggaran dana desa untuk program penanganan stunting menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Bokang Wolomatang dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan penyaluran dana yang konsisten dan realisasi anggaran yang mencapai 100% setiap tahunnya merupakan indikator bahwa secara administratif pengelolaan dana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun, angka stunting yang tidak mengalami penurunan signifikan mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa masih perlu ditinjau kembali, dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat sasaran dimana bantuan yang diberikan secara merata bukan berdasarkan data anak yang benar-benar berisiko stunting yang menyebabkan angka stunting setiap tahun meningkat. Efektivitas dalam hal ini mencakup tidak hanya realisasi anggaran, tetapi juga sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program penanganan stunting perlu mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi masyarakat agar dana desa dapat digunakan secara optimal. Preferensi masyarakat, seperti bentuk bantuan yang diharapkan, waktu pelaksanaan kegiatan, hingga metode edukasi yang sesuai, memiliki peran besar dalam keberhasilan program. Misalnya, sebagian keluarga mungkin lebih membutuhkan pendampingan intensif terkait pola makan anak dan sanitasi rumah tangga daripada sekadar menerima bantuan makanan tambahan (Rahmawati:2020). Ketika program tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan nyata masyarakat, maka partisipasi menjadi rendah dan dampaknya terhadap penurunan angka stunting menjadi kurang efektif.

Pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan pendekatan yang berbasis partisipasi masyarakat dan adaptif terhadap kondisi lokal. Dengan memahami karakteristik sosial dan budaya masyarakat Desa Bokang Wolomatang, pemerintah desa dapat merancang kegiatan yang lebih tepat sasaran. Preferensi masyarakat perlu dijadikan bahan pertimbangan utama dalam menyusun program, karena efektivitas hanya dapat dicapai apabila masyarakat sebagai penerima manfaat merasa terlibat dan terbantu secara nyata. Oleh karena itu, penyesuaian program dengan kebutuhan lokal menjadi kunci dalam meningkatkan hasil yang diharapkan dari penggunaan dana desa.

Efektivitas pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan program penanganan stunting di tingkat desa. Meskipun alokasi dan realisasi dana di Desa Bokang Wolomatang telah berjalan dengan baik secara administratif, angka kasus stunting yang belum

menunjukkan penurunan signifikan menimbulkan pertanyaan terkait dampak nyata dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, serta hasil program yang didanai oleh dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan berjudul **"Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Stunting dalam Program Penanganan Stunting di Desa Bokang Wolomatang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelolaan dana stunting di desa bokang wolomatang telah sesuai PDTT Nomor 8 tahun 2022?
2. Bagaimana Upaya untuk efektivitas pengelolaan dana desa untuk program penanganan stunting di Desa Bokang Wolomatang?
3. Faktor-Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam program tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana stunting di Desa Bokang Wolomatang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh PDTT Nomor 8 tahun 2022.

2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa untuk program penanganan stunting di Desa Bokang Wolomatang.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Bokang Wolomatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi atau literatur tambahan dalam bidang akuntansi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan program penanganan stunting. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai efektivitas penggunaan dana desa dan bagaimana perencanaan serta pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa dapat dikaji secara akuntabel dan transparan.

2. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan proses penelitian lapangan, mulai dari pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, hingga analisis data. Penulis juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pengelolaan dana desa serta tantangan dalam implementasi program stunting di tingkat desa.